



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
2019**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2018**

## Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017	5
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018	5
2.2	Analisis Kinerja Pelakayanan OPD	12
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	13
2.4	Review terhadap rancangan Awal RKPD	14
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1	Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kota Padang Panjang	19
3.2	Tujuan dan Sasaran	22
3.3	Program dan Kegiatan	24
BAB V	PENUTUP	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, meliputi :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
  - a. Pengolahan data dan informasi
  - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
  - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
  - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
  - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
  - f. Perumusan tujuan dan sasaran
  - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
  - h. Perumusan kegiatan prioritas
  - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
  - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
  - k. Pembahasan forum OPD

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta perencanaan detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023), sehingga penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 nantinya akan disesuaikan dengan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, dalam rangka melaksanakan rencana tindak yang telah dirumuskan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023. Disamping itu Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan paparan di atas, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta bertugas dan berfungsi membantu Kepala Daerah dalam hal koordinasi perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, berkewajiban untuk menyusun Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun secara sistematis dan analisis dan dengan memperhatikan isu serta perkembangan kondisi terkini penyusunan rencana pembangunan, terutama sekali dalam rangka pencapaian target pembangunan lima tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor        Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi serta Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor    Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja OPD Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah untuk menyusun program dan kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2019.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I      Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **Bab II      Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2017**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPE berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **Bab III     Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2018**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

#### **Bab IV     Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018.

Secara umum, pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik mencapai 100%. Namun jika direview berdasarkan target kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018) realisasi capaian kinerja kurang dari 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak direncanakan dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018). Hal ini dilaksanakan karena kebutuhan perencanaan dan adanya ketentuan dan peraturan dari Pemerintah pusat. Diantara kegiatan yang tidak terencana dalam Renstra tersebut antara lain :

- Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari APBN Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Namun disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018), namun tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena mengingat perkembangan dan kondisi yang ada, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi anggaran. Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana antara lain :

- a. Penyusunan dokumen RP2KPKP
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dari dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
- c. Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan

Untuk lebih jelasnya, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 dapat dijelaskan pada Tabel 2.1.



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah s/d Tahun 2017**  
**Kota Padang Panjang**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD tahun 2017 (akhir periode OPD)	Realisasi target kinerja hasil prog dan keluaran keg s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017			Realisasi capaian target prog/ keg Renstra s/d tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
	01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 thn	1 thn	4.550.000	4.450.000	100%	1 thn	97,80 %	
	01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik.	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, faximili dan internet yang dibayar	1 thn	1 thn	43.215.000	35.343.722	100%	1 thn	81,79 %	
	01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan/ perizinan kendaraan dinas/ operasional	1 thn	1 thn	221.050.000	180.973.323	100%	1 thn	81,87 %	
	01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan uang lembur	1 thn	1 thn	65.700.000	65.700.000	100%	1 thn	100,00 %	
	01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya upah petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 thn	1 thn	156.212.700	145.470.348	100%	1 thn	93,12 %	
	01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang tersedia	1 thn	1 thn	99.539.000	98.795.800	100%	1 thn	99,25 %	
	01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya fotocopy, cetak blanko dan cetak/ jilid buku	1 thn	1 thn	79.760.000	77.751.500	100%	1 thn	97,48 %	
	01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 thn	1 thn	13.970.500	4.215.500	100%	1 thn	30,17 %	
	01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 thn	1 thn	59.010.000	37.992.350	100%	1 thn	64,38 %	
	01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dihadirinya rapat koordinasi dan konsultasi	1 thn	1 thn	720.000.000	655.450.777	100%	1 thn	91,03 %	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD tahun 2017 (akhir periode OPD)	Realisasi target kinerja hasil prog dan keluaran keg s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017			Realisasi capaian target prog/ keg Renstra s/d tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	4 unit komp, 8 unit printer, 2 unit laptop	4 unit komp, 8 unit printer, 2 unit laptop	120.150.000	106.187.960	100%	1 thn	88.38%
	02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 thn	1 thn	60.000.000	60.000.000	100%	1 hn	100%
	02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedungkantor	1 thn	1 thn	123.915.000	78.332.400	100%	1 thn	63.21%
	<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>								
	06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan bulanan)	1 thn	1 thn	8.725.000	8.724.200	100%	1 thn	99.99%
	06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 laporan	1 laporan	295.000	275.000	100%	1 thn	93.22%
	06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Daerah	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	295.000	275.000	100%	1 thn	93.22%
	06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	6.072.500	5.945.000	100%	1 thn	97.90%
	<b>43</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>								
	43 18	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Laporan hasil rapat koordinasi	4 kali rapat	4 kali rapat	54.900.000	53.800.000	100%	1 thn	98.00%
	43 25	Peninjauan Kembali RTRW	Dokumen peninjauan kembali RTRW	1 dokumen	1 dokumen	21.090.250	21.090.250	100%	1 thn	100%
	<b>15</b>	<b>Program Pengembangan data/ informasi</b>								
	15 12	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Terupdatenya data pembangunan daerah	1 thn	1 thn	212.925.000	203.747.277	100%	1 thn	95.69%

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD tahun 2017 (akhir periode OPD)	Realisasi target kinerja hasil prog dan keluaran keg s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017			Realisasi capaian target prog/ keg Renstra s/d tahun 2017		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15 13	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	Tersedianya software perencanaan dan sumber daya yang mampu	1 paket	1 paket	176.400.000	129.387.275	100%	1 thn	73.35%	
	20	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>									
	20 01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terkirimnya aparat perencana yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	20 orang	20 orang	60.000.000	60.000.000	100%	1 thn	100%	
	21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
	21 07	Pelaksanaan Forum SKPD Gabungan	Terlaksananya forum SKPD Gabungan	1 kali	1 kali	48.659.000	46.904.900	100%	1 thn	96.40%	
	21 08	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD Kota Padang Panjang tahun 2018	1 dok, 80 eks	1 dok, 80 eks	66.100.000	61.021.000	100%	1 thn	92.32%	
	21 09	Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD tingkat Kota	1 kali	1 kali	57.515.000	55.909.950	100%	1 thn	97.21%	
	21 15	Penyusunan KUA	Tersusunnya rancangan KUA tahun 2018	75 eksp	75 eksp	54.250.000	40.163.650	100%	1 thn	74.10%	
	21 16	Peyusunan PPA	Tersusunnya rancangan PPAS tahun 2018	75 eksp	75 eksp	203.634.000	191.912.450	100%	1 thn	94.24%	
	21 17	Penyusuna KUA PPA Perubahan	Dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran perubahan APBD	150 eksp	150 eksp	118.368.000	105.451.800	100%	1 thn	89.09%	
	21 22	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2013-2018	Laporan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD 2013-2018	1 laporan	1 laporan	19.750.000	18.916.650	100%	1 thn	95,78%	
	21 30	Investigasi usulan kegiatan pembangunan	Laporan investigasi usulan musrenbang kecamatan	62 eksp	62 eksp	33.274.000	32.854.000	100%	1 thn	98,74%	
	21 31	Rewiew RPI2JM Kota Padang Panjang	Dokumen perencanaan infrastruktur bidang cipta karya jangka menengah	20 eksp	20 eksp	53.910.000	53.483.000	100%	1 thn	99,21%	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD tahun 2017 (akhir periode OPD)	Realisasi target kinerja hasil prog dan keluaran keg s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017			Realisasi capaian target prog/ keg Renstra s/d tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
	21 32	Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kerja Pembangunan Daerah	Laporan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKPD	1 laporan	1 laporan	123.600.000	119.357.800	100%	1 thn	
	21 33	Pelaksanaan Penyusunan Renstra OPD Pemerintah Kota Padang Panjang				32.325.000	30.972.700	100%		95,82%
	21 42	Penyusunan RKPD Perubahan	Dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD perubahan)	50 ksp	50 ksp	43.700.000	41.935.800	100%	1 thn	95,96%
	21 44	Optimalisasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Laporan rencana aksi anti korupsi	4 triwulan	4 triwulan	48.900.000	46.400.000	100%	1 thn	94,89%
	21 47	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai dari APBN				37.700.000	36.904.000	100%		97,89%
	<b>22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>								
	22 05	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				16.050.000	14.603.000	100%		90,98%
	<b>23</b>	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>								
	23 06	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud								
	23 08	Pemantauan Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	1 buku	1 buku	55.000.000	41.950.000	100%	1 thn	94%
	23 09	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG				40.745.000	38.700.450	100%		94,98%
	23 10	Pemantauan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)				14.516.000	14.516.000	100%		100%

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD tahun 2017 (akhir periode OPD)	Realisasi target kinerja hasil prog dan keluaran ke s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017			Realisasi capaian target prog/ keg Renstra s/d tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
	25	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>								
	25	03 Forum Dewan Riset daerah			62.925.000	58.158.750	100%		92,43%	
	25	04 Penelitian dan Kajian Sosial			77.827.000	66.08400	100%		85,20%	
	25	05 Penelitian dan Kajian Ekonomi Infrastruktur			54.202.000	50.796.400	100%		93,72%	
	25	06 Diskusi Aktual Pembangunan Daerah			32.375.000	29.056.450	100%		89,72%	
	25	07 Diskusi Aktual Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya								

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang merupakan OPD yang bertugas dan berfungsi melaksanakan sebagian wewenang pemerintah daerah dalam hal mengkoordinir perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Berikut disajikan pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang**

No	Indikator	IKK	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2014	2015	2016	2017	
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	6	6	6	6	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	0	0	1	0	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	1	1	1	1	
4	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	Jml program RKPd thn n/jml program RPJMD yg hrs dilksnakan x 100%	70%	75%	80%	85%	
5	Persentase akomodasi usulan Musrenbang Kota minimal 30% dalam RKPd	Ada	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%	
6	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UU Penataan Ruang (Dok RTRW)	Ada	1	1	1	1	
7	Persentase akomodasi program RPJMD ke dalam RKPd	Ada	70%	75%	80%	85%	
8	Tingkat ketersediaan Data/Informasi dan Statistik Daerah	Ada	100%	100%	100%	100%	
1	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan disadari bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, baik perencanaan skala kota, maupun perencanaan OPD di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Namun selama tahun 2009-2013 pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator perencanaan pembangunan ini belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

- a. Belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.
- b. Kurangnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur perencana, baik di OPD maupun di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sendiri.
- c. Tahapan perencanaan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan sempitnya waktu untuk melaksanakan serangkaian proses perencanaan tersebut.
- d. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
- e. Terjadinya mutasi ditengah pelaksanaan perencanaan pembangunan, akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan review penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya OPD mempedomani dokumen perencanaan Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD.
- b. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi proses perencanaan pembangunan dengan OPD dan stakeholders.
- c. Belum optimalnya evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan.
- d. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan serta berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar perencanaan itu sendiri.
- e. Dalam implementasinya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan.
- g. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

### **2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada RENJA Bappeda dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.2.



**Tabel 2.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017**  
**Kota Padang Panjang**

Kode				Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.326.284.500</b>
1	06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 tahun	4.850.000
1	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, faximili, dan internet yang dibayar	1 tahun	91.800.000
1	06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	360.375.000
1	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan uang lembur	1 tahun	73.200.000
1	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya upah petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	118.475.000
1	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun	80.374.000
1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya biaya fotokopi, cetak blanko dan cetak/jilid buku	1 tahun	70.740.000
1	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik	1 tahun	21.470.000
1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya langganan surat kabar dan buku pustaka	1 tahun	2.000.000
1	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 tahun	60.000.000
1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dihadirinya rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	445.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>376.350.000</b>
1	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	3 unit computer, 2 unit laptop, 5 unit printer	261.350.000
1	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	85.000.000
1	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	30.000.000

Kode				Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>3.495.000</b>
1	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan)	1 tahun	2.000.000
1	06	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 laporan	295.000
1	06	06	03	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	1 laporan	295.000
1	06	06	04	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran daerah	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	6.072.500
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan data/ informasi</b>			<b>319.175.000</b>
1	06	15	07	Pengembangan dan updating GIS	Updating Database GIS	1 paket	38.150.000
1	06	15	12	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Database informasi Padang Panjang	1 thn	168.000.000
1	06	15	09	Diskusi aktual pembangunan daerah bidang sosbud	Buku rangkuman diskusi aktual pembangunan bidang sosial dan budaya	1 buku	25.400.000
1	06	15	10	Diskusi aktual pembangunan daerah			37.625.000
1	06	15	11	Sistem Manajemen Perencanaan	Tersedianya aplikasi perencanaan	1 paket	50.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>50.000.000</b>
1	06	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Diikutinya bintek/kursus singkat/ pelatihan oleh aparat Bappeda	2 orang/kali	50.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>21</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>916.343.000</b>
1	06	21	07	Pelaksanaan forum gabungan SKPD	Terlaksananya forum pembahasan renja SKPD	1 kali	59.750.000
1	06	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD	dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD)	80 eksp	74.100.000
1	06	21	09	Musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD	1 kali	76.825.000

Kode				Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran
1	06	21	15	Penyusunan KUA	Dokumen kebijakan umum anggaran	75 eksp	60.270.000
1	06	21	16	Penyusunan PPA	Dokumen prioritas plafon anggaran	75 eksp	137.434.000
1	06	21	17	Penyusunan KUA PPA Perubahan	dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran perubahan APBD	150 eksp	149.434.000
1	06	21	22	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2013-2018	Laporan Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan RPJMD 2013-2018	1 laporan	39.500.000
1	06	21	23	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	laporan investigasi usulan musrenbang kecamatan	62 eksp	33.550.000
1	06	21	27	Review RPIJM	dokumen perencanaan infrastruktur bidang cipta karya jangka menengah	20 eksp	52.060.000
1	06	21	34	Evaluasi dan pengendalian rencana kerja pembangunan daerah	Laporan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKPD	1 laporan	87.550.000
1	06	21	42	Penyusunan RKPD perubahan	dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD perubahan)	50 ksp	59.500.000
1	06	21	44	Optimalisasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Laporan rencana aksi anti korupsi	4 triwulan	37.620.000
1	06	21	47	Koordinasi pelaksanaan kegiatan dari dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Laporan koordinasi pelaksanaan kegiatan dana TP UB	4 triwulan	48.750.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>23</b>		<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>			<b>123.558.500</b>
1	06	23	06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Laporan	1 laporan	16.888.500
1	06	23	08	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	1 laporan	42.050.000
1	06	23	09	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	Dokumen PPRG dan Laporan Koordinasi dan Evaluasi	1 laporan	44.470.000
1	06	23	10	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	Laporan Pelaksanaan TKPP	1 laporan	20.150.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>25</b>		<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>134.785.000</b>
			01	Penelitian dan pengembangan di Kota Padang Panjang	Workshop dan publikasi hasil penelitian	1 kali dan 1 buah	134.785.000

<b>1</b>	<b>06</b>	<b>15</b>		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>			<b>348.450.000</b>
1	06	15	18	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang perubahan RTRW	Laporan	4 kali rapat	48.800.000
			19	Peninjauan Kembali RTRW		1 buku	299.650.000
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>			<b>213.150.000</b>
1	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Diikutinya pameran dalam dan luar daerah serta temu usaha	2 kali pameran luar daerah dan temu usaha	181.000.000
1	16	15	02	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Buku laporan hasil monitoring evaluasi	50 eksp	32.150.000
				<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi</b>			<b>116.350.000</b>
				Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Perwako Kebijakan penanaman modal	1 perwako	116.350.000
					<b>Total Pagu Anggaran</b>		<b>3.967.858.500</b>

## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kota Padang Panjang

Dalam Tataran globalisasi, akhir-akhir ini dampaknya dalam hal ketatanegaraan telah mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang mengarah semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*). Namun di lain sisi dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*), layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu yang secara langsung berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berbagai masalah tersebut di atas, tentunya peran pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan masalah yang terjadi di daerah yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kelima tujuan tersebut di atas, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2010-2015 tentunya menuntut sinergisitas, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan

yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Sumatera Barat yang cukup strategis, mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk benar-benar menyusun perencanaan yang matang dan akomodatif. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, termasuk Padang Panjang, perlu disikapi dengan baik. Permasalahan yang dihadapi antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, keterbatasan luas wilayah, penanggulangan bencana serta permasalahan lainnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang. Arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang ditujukan antara lain penguatan aparatur yang bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pemahaman ABS SBK serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Visi Kota Padang Panjang yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah **“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”** Sedangkan penjabaran visi tersebut adalah :

- Padang Panjang **Amanah** memiliki makna pemerintahan daerah dan masyarakat Kota padang panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanah yang dipercaya masyarakat dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang relevan;
- Padang Panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pemerintahan terutama terkait dengan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan tujuan pembangunan daerah dilakukan secara aman dan tentram;
- Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera mengandung makna sebagai kota yang mencerminkan unsur pemerintahan dan masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan ke dalam misi yaitu sebagai berikut :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;

4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya.

Guna mewujudkan visi dan misi di atas, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan optimal. Sebagai lembaga yang mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda Kota Padang Panjang menjabarkan visi dan misi Walikota tersebut dalam visi Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan DAN Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang serta berdasarkan analisis kondisi permasalahan yang ada, dan dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi kepala daerah, maka Visi Bappeda Tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

***“Perencanaan yang Berkualitas dan Litbang yang Inovatif menuju Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera”***

Ada tiga frase yang terkandung dalam visi tersebut, yaitu Perencanaan yang berkualitas, Litbang yang inovatif, Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yakni :

1. Partisipatif, yaitu perencanaan pembangunan dirumuskan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
2. Responsif, yaitu perencanaan pembangunan dirumuskan merupakan respon danantisipasi atas berbagai potensi dan permasalahan yang terjadi atau akan terjadi di tengah masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, yaitu perencanaan pembangunan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur terhadap proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
5. Terukur, yaitu perencanaan pembangunan yang memiliki target-target kinerja yang dapat diukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efektif dan Efisien, yaitu perencanaan pembangunan yang dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan cara yang optimal, serta dengan mengusahakan masukan yang terendah untuk mencapai keluaran yang maksimal.

Berdasarkan uraian visi di atas, berikut ini ditetapkan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu :

- a. Mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas, dan penelitian dan pengembangan yang inovatif.

Sesuai dengan visi dan misi Kota Padang Panjang, ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah tahun 2013-2018 adalah :

1. Peningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih
3. Peningkatan pendidikan yang berbudaya islami
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
6. Pengembangan Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan
7. Pengembangan Industri dan Perdagangan
8. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya
9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
10. Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang periode 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018), maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang periode 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018) adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
- b. Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah



Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

**Tabel. 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

**Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2019
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD	%	75
			Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD	%	70
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD	%	70
		Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah	%	20

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 antara lain adalah :

1. Penetapan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
2. Penetapan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023.
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima dan Renja Bappeda sampai dengan Tahun 2017.
4. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2019.
5. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Bappeda.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2019 disajikan dalam Tabel T-C.33.



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
<b>02 01 20</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RKPD bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ke dalam APBD</b>		<b>75%</b>	<b>117,550,000</b>			<b>75%</b>	<b>87,550,000</b>
02 01 20 05	Pemantauan dan Monitoring P3MK	Terlaksananya monitoring P3MK	Padang Panjang	4 kali	28,550,000	APBD		4 kali	28,550,000
02 01 20 05	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	Terlaksananya koordinasi pembangunan perumahan dan sanitasi	Padang Panjang	4 kali	20,000,000	APBD		4 kali	20,000,000
02 01 21 27	Review RPI2JM	Tersedianya dokumen perencanaan investasi bidang cipta karva	Padang Panjang	1 dokumen	39,000,000	APBD		1 dokumen	39,000,000
02 01 15 14	Pengembangan dan Updating GIS	Terlaksananya pengembangan WebGIS	Padang Panjang	1 paket	30,000,000			1 paket	30,000,000
<b>02 01 15</b>	<b>Program Pengembangan data/ informasi</b>	<b>Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah</b>		<b>75%</b>	<b>310,500,000</b>			<b>75%</b>	<b>310,500,000</b>
02 01 15 12	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	database Informasi Padang Panjang untuk 1 tahun	Padang Panjang	6 data urusan pemerintah, 1 aplikasi	115,500,000	APBD		6 data urusan pemerintah, 1 aplikasi	115,500,000
02 01 15 13	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	Jumlah aplikasi dan modul yang dikembangkan	Padang Panjang	5 aplikasi/modul	195,000,000	APBD		5 aplikasi/modul	195,000,000
<b>02 01 21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dan RKPD kedalam APBD</b>		<b>75%</b>	<b>840,000,000</b>			<b>75%</b>	<b>840,000,000</b>
02 01 21 07	Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	Jumlah forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan	Padang Panjang	2 kali	90,000,000	APBD		1 kali	90,000,000
02 01 21 08	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu	Padang Panjang	1 dokumen	23,000,000	APBD		1 dokumen	23,000,000
02 01 21 09	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD	Padang Panjang	1 kali	80,000,000	APBD		1 kali	80,000,000
02 01 21 22	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2013-2018	Jumlah laporan evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2013-2018	Padang Panjang	1 laporan	25,000,000	APBD		1 laporan	25,000,000
02 01 21 23	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	Tersedianya buku laporan dan rekap usulan kegiatan tahun 2020 hasil investigasi	Padang Panjang	1 dok, 60 eks	40,000,000	APBD		1 dok, 60 eks	40,000,000
02 01 21 34	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD	Laporan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKPD	Padang Panjang	5 laporan	60,000,000	APBD		1 laporan	60,000,000
02 01 21 40	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah masyarakat yang ikut dalam pelatihan/bimek	Padang Panjang	16 kelurahan	95,000,000	APBD		1 kali, 2 kec, 16 kel	95,000,000
02 01 21 42	Penyusunan RKPD Perubahan	Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun	Padang Panjang	1 dokumen	18,000,000	APBD		1 dokumen	18,000,000
02 01 21 47	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari APBN	Laporan koordinasi pelaksanaan kegiatan dana APBN triwulan dalam 1 tahun	Padang Panjang	4 Laporan	40,000,000	APBD		4 Laporan	40,000,000
02 01 21 49	Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun	Padang Panjang	48 dokumen	174,000,000	APBD		48 dokumen	174,000,000
02 01 21 50	Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan RPJMD 2019-2023	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2019-2023	Padang Panjang	1 laporan	35,000,000	APBD		1 laporan	35,000,000
02 01 21 51	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	Jumlah dokumen rancangan akhir RPJMD	Padang Panjang	1 dokumen	150,000,000	APBD		1 dokumen	150,000,000
02 01 21 52	Penyusunan Kalender Perencanaan Pembangunan	Jumlah kalender perencanaan pembangunan tahun 2020 yang disusun	Padang Panjang	1 dokumen	10,000,000	APBD		1 kali	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)
<b>02 01 22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RKPD bidang ekonomi ke dalam APBD</b>		<b>75%</b>	<b>105,000,000</b>				<b>105,000,000</b>
02 01 22 05	Dana Pendamping Business Development Center (BDC) / Biaya Operasional BDC	Laporan Pelaksanaan BDC	Padang Panjang	1 laporan	105,000,000	APBD		1 laporan	105,000,000
<b>02 01 23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RKPD bidang sosial dan budaya ke dalam APBD</b>		<b>75%</b>	<b>183,805,000</b>				<b>183,805,000</b>
02 01 23 08	Pemantauan perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan sosial (TKPK)	Terlaksananya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2018-2023 dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah serta koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang PANIANG Tahun 2019	Padang Panjang	1 dokumen, 1 LP2KD, 4 kali rapat	95,000,000	APBD		1 dokumen, 1 LP2KD, 4 kali rapat	95,000,000
02 01 23 09	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PUG, PPRG bagi Eselon II-IV serta evaluasi pelaksanaan PUG	Padang Panjang	1 tahun	38,105,000			1 tahun	38,105,000
02 01 23 10	Pemantauan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	Terciptanya sinkronisasi program kegiatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Padang Panjang	1 laporan	15,700,000	APBD		1 laporan	15,700,000
02 01 23 11	Pembinaan Forum Kota Sehat	Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan forum Kota Sehat	Padang Panjang	10 kali, 100 orang	35,000,000	APBD		1 laporan	35,000,000
02 01 21 44	Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya aksi PPK	Padang Panjang	4 laporan	11,400,000	APBD		4 laporan	11,400,000
<b>02 01 25</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah</b>		<b>70%</b>	<b>520,250,000</b>			<b>70%</b>	<b>520,250,000</b>
02 01 25 04	Penelitian dan kajian sosial	Jumlah dokumen penelitian dan kajian sosial yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 dokumen	71,500,000	APBD		1 dokumen	71,500,000
02 01 25 05	Penelitian dan kajian ekonomi dan infrastruktur pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian ekonomi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat	Padang Panjang	1 dokumen	71,500,000	APBD		1 dokumen	71,500,000
02 01 25 06	Diskusi Aktual Pembangunan Daerah	Jumlah topik diskusi aktual pembangunan daerah yang dilaksanakan	Padang Panjang	3 topik	23,500,000	APBD		3 topik	23,500,000
02 06 25 08	Penguatan peran pelaku kelitbangan dan dewan riset daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan DRD	Padang Panjang	1 laporan	97,500,000	APBD		1 laporan	97,500,000
02 06 25 09	Lomba karya ilmiah IPTEK dan pelatihan penyusunan karya tulis jurnal ilmiah	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba karya ilmiah IPTEK tingkat pelajar/mahasiswa	Padang Panjang	50 orang	90,000,000	APBD		50 orang	90,000,000
02 01 25 10	Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis	Jumlah dokumen hasil survei yang dihasilkan	Padang Panjang	1 dokumen	96,250,000	APBD		1 dokumen	96,250,000
02 06 25 13	Elektronik Penelitian dan Pengembangan (e-riset)	Jumlah aplikasi hasil riset secara online yang dihasilkan	Padang Panjang	1 aplikasi	70,000,000	APBD		1 aplikasi	70,000,000
<b>02 01 26</b>	<b>Penguatan Inovasi Daerah</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>		<b>20.83%</b>	<b>173,000,000</b>				<b>173,000,000</b>
02 01 26 01	Penyusunan Grand Design SIDA	Jumlah dokumen grand design SIDA yang disusun	Padang Panjang	1 dokumen	93,000,000	APBD		1 dokumen	93,000,000
02 01 26 02	Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah	Jumlah dokumen pembinaan dan penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun	Padang Panjang	1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	30,000,000
02 01 26 03	Pembentukan Pusat Peragaan IPTEK	Jumlah dokumen perencanaan pembentukan pusat peragaan IPTEK	Padang Panjang	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

**PRIORITAS KEDUA**

02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				865,000,000			71,500,000
02 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan (Faximili, Penghancur Kertas, Notebook, Komputer, Printer dan Scanner)	Padang Panjang	1 paket (Faximili, Penghancur Kertas, Notebook, Komputer, Printer dan Scanner)	65,000,000	APBD		1 paket (scanner, faximile, printer, printer portable, kursi rapat)
02 01 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya 2 kendaraan roda 4	Padang Panjang	2 unit roda 4	500,000,000			
02 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Padang Panjang	1 tahun	200,000,000			
02 01 02	Rehabilitasi Taman Kantor	Terlaksananya taman kantor yang representatif	Padang Panjang	1 tahun	100,000,000			

# BAB IV

## PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

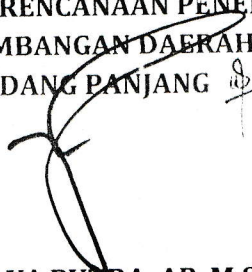
Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2019. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2018 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang selama tahun 2018. Terlaksananya Renja Bappeda Kota Padang

Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait di Bappeda Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Februari 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**



**SONNY BUDAYA PUTRA, AP. M.Si**  
Pembina Utama Muda NIP. 19750331 199501 1 001